

BAB I**PENDAHULUAN****I.1 Latar Belakang**

Desa Adat atau yang lebih dikenal di Bali dengan sebutan desa Pakraman sering terjadi konflik-konflik yang bernuansa adat. Konflik-konflik adat tersebut berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut wilayah antar kedua Desa (banjar). Perebutan wilayah Desa yang terjadi, melibatkan antara Desa induk dan Desa yang ingin memekarkan diri yang tidak jarang berakhir pada kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa dalam konflik tersebut. Konflik horizontal ini sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan dan berpeluang besar kembali terjadi konflik semacam itu.

Pemekaran Desa Pakraman di Bali kerap memicu konflik dan perselisihan, baik antara Desa Pakraman induk dengan Desa Pakraman baru maupun Desa Pakraman sekitar. Konflik tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama dan terus terulang kembali hingga sekarang dengan kasus yang sama. Hampir semua wilayah di Bali, sering mengalami konflik antar Desa Adat. Hal inilah mengapa peneliti tertarik untuk meneliti kasus konflik adat yang ada di Bali. Dari kumpulan fenomena dan peristiwa yang dipaparkan, akan menjadi acuan peneliti untuk bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian.

Seperti Konflik antar Desa yang dipicu karena Banjar ingin memekarkan menjadi Desa Pakraman. Banyak Banjar atau Dusun yang dulunya di bawah Desa Pakraman memisahkan dari Desa induknya menjadi Desa Pakraman tersendiri. Pemakaran tidak hanya terjadi pada Banjar yang ingin menjadi Desa Pakraman, bahkan Banjar memekarkan diri menjadi banjar tersendiri dengan berbagai alasan di dalamnya untuk bisa memekarkan diri. Untuk bisa menjadi Desa Pakraman (majelis utama desa pakraman) MUDP Desa Pakraman harus memiliki Pura Kahyangan Tiga (Pura Puseh, Dalem, dan Bale Agung), tanah pura, kuburan (setra), dan juga memiliki minimal 200 kartu keluarga. Sehingga MUDP akan memberikan SK bagi Desa Adat yang memenuhi kriteria sebagai Desa Pakraman yang kemudian akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk ditanda tangani dan di sahkan.

Syarat yang telah ditentukan untuk bisa menjadi Desa Pakraman tersebutlah yang menjadi perebutan antar Desa Adat untuk bisa memenuhi kriteria sebagai Desa Pakraman yang baru. Berbagai peristiwa-peristiwa mengenai konflik adat antar Desa dalam merebutkan wilayah di Bali diantaranya adalah perebutan setra atau tanah kuburan oleh kedua Desa di Kabupaten Klungkung. Konflik tersebut melibatkan Desa Adat Kemuning dan Budaga.

Awal konflik yang terajadi karena adanya indikasi perebutan tanah kuburan, tanah kuburan yang pada awalnya dikelola oleh kedua Desa tersebut beserta Desa Adat Galiran dan Gunung Niang menjadi konflik perebutan Desa

kemoning dan budaga. Konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antar anggota masyarakat Desa Adat. Akhirnya konflik yang terjadi menimbulkan kekerasan dan pertikaian antar Desa Kemoning dan Budaga yang berujung pada tewasnya salah satu warga desa.¹

Menurut Masyarakat Desa Kemoning, Setranya memang sudah dari dulu menjadi wewengkon desa adat Kemoning yang telah ditetapkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman Pusat. Desa Budaga merupakan bukan warga asli desa Kemoning, tetapi mendapatkan keringanan dari Desa Kemoning untuk diperbolehkannya menggunakan setra Desa Kemoning. Sebenarnya tidak hanya Desa Kemoning dan Budaga, Kabupaten Gianyar juga sangat rawan Konflik perebutan tanah kuburan. Seperti Desa Adat antara Semana dan Ambengan yang merebutkan setra atau kuburan.

Dalam pemekaran Desa Pakraman memang banyak pro dan kontra ditengah masyarakat desa. Masyarakat Desa yang pro terhadap pemekaran sangat berkeinginan untuk dapat segera bisa memekarkan Desanya menjadi desa pakraman tersendiri. Kemudian masyarakat yang kontra terhadap pemekaran, mereka mencoba untuk mempertahankan agar tidak terjadi pemekaran Desa. Segala upaya masing-masing pihak masyarakat yang pro dan kontra melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan kepentingannya.

Seperti suatu contoh kasus yang terjadi ketika ada salah satu warga banjar meninggal, dan ketika itu jenazah akan dititipkan di rumah sakit

¹ <http://bali.antaranews.com/berita/14206/bentrokan-di-kemoning-dan-budaga-tewaskan-warga>

karena alasan hari baik, sehingga jenazah itu tidak dapat langsung dikuburkan. Kemudian jenazah dikirim menggunakan ambulan menuju rumah sakit untuk ditiptkan sembari menunggu hari baik itu untuk dikuburkan. Tetapi dalam perjalanan menuju rumah sakit, mobil ambulan itu dihadang oleh warga bazar lain yang tidak setuju jenazah itu melewati Desanya. Kepercayaan masyarakat Bali, apabila ada seorang penduduknya yang meninggal maka secara langsung desa tersebut akan menjadi leteh (kotor) secara niskala (alam gaib). Tetapi selain alasan Kepercayaan tersebut ada unsur politik di dalamnya mengenai kematian salah satu warga kelompok kecil di Banjar Pangkung Karung Kawan ini memberikan gambaran betapa kepercayaan adat tersebut cukup riskan untuk digunakan sebagai bargaining politik dalam penuntutan pemekaran Desa oleh warga masyarakat kelompok besar di Desa Pangkung Karung.

Sebenarnya dari dulu Kelompok Besar Desa Pangkung Karung Kerambitan ingin Memekarkan diri menjadi sebuah Desa Pakraman yang sebelumnya berada dalam Desa Pakraman Bedha. Berhubung tuntutan masyarakat Desa Pangkung Kerambitan belum terpenuhi untuk bisa menjadi desa Pakraman, mereka menggunakan moment penghadangan jenazah sebagai bargaining politik untuk segera mendesak Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) untuk segera menetapkan Desa Pangklung Karung Kerambitan menjadi Desa Pakraman. Hingga akhirnya konflik itu mereda ketika Wakil Bupati Tabanan I KG Sanjaya dan Kapolres Tabanan AKBP AA Made Sudana akan menjajikan pemekaran akan segera di perbincangkan untuk keberhasilan pemekaran tersebut.

Akar masalah konflik adat ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2008, dimana warga kelompok besar Desa Pangkung Karung menuntut adanya pemekaran desa Adat menjadi desa Adat yang terpisahkan dari Desa Adat induk yaitu Desa Pakraman Bedha.² Desa Bedha merupakan Desa Pakraman yang mewilayahi tiga kecamatan sekaligus di Kabupaten Tabanan. Tiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri yang terdiri hingga 38 Banjar Adat. Kondisi demikian dinilai sebagai sebuah kondisi yang tidak biasa karena terlalu banyaknya jumlah Banjar Adat yang dibawah untuk sebuah Desa Pakraman di Bali. Atas dasar kondisi yang demikian maka kelompok besar di Desa Pangkung Karung memperjuangkan diri untuk bisa dimekarkan menjadi Desa Pakraman tersendiri.

Kemudian Fenomena selanjutnya yang sering terjadi adalah perebutan tapal batas Desa. Tapal batas Desa sering terjadi perebutan antar kedua Desa yang saling mengklaim tapal batas Desa. Bahkan tidak sedikit menimbulkan konflik yang berujung pada pertikaian antara kedua Desa. Kasus perebutan tapal batas yang melibatkan kedua Desa yaitu antara Desa Ubud dan Desa Mas di Kabupaten Gianyar. Perebutan tapal batas juga tidak hanya terjadi di Gianyar, Perebutan itu hampir terjadi diseluruh daerah di Bali. Perebutan tapal batas antara Desa Macang dan Ngis di Karangasem. Perebutan tapal batas tersebut selalu menimbulkan ketegangan antar kedua warga desa.

² <http://abr-center.blogspot.com/2012/01/quo-vadis-pangkung-karung.html>

Kedua kelompok warga yakni Ngis di Kecamatan Manggis dan Macang, Kecamatan Bebandem sempat tegang. Balai pesandekan Pura Tirta, dua rumah penduduk dirusak dan dibakar massa, serta sejumlah pohon ditumbang. Pelakunya diduga oknum warga Ngis, terkait saling klaim tapal batas kedua desa bertetangga itu. Di Karangasem ada dua konflik akibat perebutan tapal batas Desa yang sudah mencuat ke permukaan, bahkan sudah menimbulkan aksi perusakan (anarkis). Kedua konflik itu yakni tapal batas antara Desa Antiga dan Ulakan di Manggis. Sementara kini yang tengah memanas yakni sengketa tapal batas antara Desa Ngis, Kecamatan Manggis, serta Macang, Bebandem.³

Konflik-konflik antar Desa Adat atas kepentingan pemekaran menjadi Desa Pakraman menimbulkan merembetnya masalah yang mengatasnamakan adat. Anarkisme warga desa adat memicu terjadinya ketegangan antar Desa adat yang memicu adanya bentrok dan perusakan. Memang ada wacana dari Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan dana bantuan kepada setiap desa Pakraman, untuk setiap Desa Pakraman mendapatkan dan bantuan 200 juta.⁴ Hal ini yang menyebabkan Desa Adat ingin memisahkan diri dari Desa induknya untuk bisa menjadi Desa Pakraman baru. Selain itu juga wilayah Desa Pakraman yang terlalu besar yang membawahi banyak desa-desa adat bahkan hingga 3 kecamatan dibawah

³ <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/12/1/b12.htm>

⁴ <http://www.antarabali.com/berita/65265/pemprov-bali-siapkan-sarjana-pendamping-desa-pakraman>

Desa Pakraman membuat tidak meratanya bantuan dana dari Pemerintah hingga Desa-Desa Adat ingin memekarkan menjadi Desa Pakraman tersendiri.

Pemekran Desa Pakraman di Bali tidak semuanya berjalan dengan mulus, banyak yang selalu diiringi dengan konflik-konflik di dalamnya. Konflik yang awalnya hanya melibatkan sedikit orang, dengan cepat melebar ke semua warga desa. Konflik semakin melebar dan semakin tidak terkendali hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Walaupun Pemerintah Bali telah berusaha mencegah konflik terjadi, tetap saja konflik sewaktu-waktu dapat terjadi kembali. Warga desa di Bali yang sangat patuh dan menghormati adatnya membuat konflik-konflik yang bernuansa adat sangat sensitif bagi mereka. Fanatisme terhadap adat, membuat warga desa adat rela melakukan apapun demi kepentingan Desa Adatnya.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah di paparkan, maka akan coba di rumuskan beberapa latar belakang penelitian, antar lain :

1. Apa yang menyebabkan perbedaan persepsi sehingga menjadi persoalan konflik masing-masing pihak Desa Adat?
2. Bagaimana tahap eskalasi konflik antara kedua Desa Adat?
3. Bagaimana resolusi konflik antara kedua Desa Adat ?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbedaan persepsi yang menjadi persoalan konflik dari masing-masing Desa Adat yang terlibat dalam pemekaran Desa.
2. Mengetahui tahapan konflik sampai menuju eskalasi konflik antara kedua Desa Adat.
3. Mengetahui resolusi konflik antara kedua Desa Adat.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi dalam pemekaran Desa Pakraman di Bali.
2. Secara praktis, studi ini akan memberikan gambaran atau informasi terhadap akar permasalahan yang terjadi dalam pemekaran Desa Pakraman di Bali dan juga menjelaskan bagaimana solusi yang diambil oleh pihak-pihak yang berkonflik.

I.5 Kerangka Teori

I.5.1 Teori Konflik

I.5.1.1 Sumber-Sumber Konflik

Menurut teori konflik yang digagas oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, ada beberapa dimensi dalam kepentingan. Kepentingan dapat dipersepsikan secara universal dan juga secara spesifik. Selain itu kepentingan juga mempunyai prioritas. Prioritas inilah yang membedakannya dengan masing-masing pihak. Sebelum perbedaan kepentingan suatu pihak bertentangan dengan pihak yang lain, maka kepentingan tersebut harus

diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi yang mana di dalamnya terdapat tujuan dan standar.⁵ Aspirasi inilah yang kemudian harus dianggap tidak sesuai dengan aspirasi pihak lain. Ketidaksesuaian inilah yang menghasilkan persepsi dari masing-masing pihak bahwa pemuasan atas aspirasi suatu pihak menghalangi aspirasi pihak yang lainnya. Dengan demikian, suatu konflik selalu dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi mengenai kepentingan.

Kemudian yang menyebabkan ketidaksesuaian aspirasi yaitu pertama tingginya tingkat aspirasi suatu pihak, kedua persepsi suatu pihak terhadap pihak lain dan tidak ditemukannya alternatif diantara kedua belah pihak.

Pertama, determinan tingkat aspirasi Ada dua determinasi tingkat aspirasi, pertama, aspirasi akan bangkit dan menghasilkan konflik karena masing-masing pihak mempunyai alasan untuk percaya bahwa mereka menganggap mampu untuk mendapatkan sumberdaya yang bernilai bagi diri mereka sendiri atau bersifat realistik. Kedua, mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki sumberdaya yang bernilai tersebut atau bersifat idealis. Peningkatan aspirasi dengan alasan realistik seperti di atas, muncul ketika orang berhadapan dengan pihak lain yang sumberdayanya dianggap berharga dari apa yang telah dimilikinya. Oleh sebab itulah ketika aspirasi antara kedua pihak tidak menurun secara bersamaan, maka konflik akan bersifat semakin eksploitatif. dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam cara diantaranya prestasi masa lalu, kemudian persepsi mengenai kekuasaan, aturan dan

⁵ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2009. Hlm. 21-22

norma, perbandingan dengan orang lain, dan terakhir terbentuknya kelompok pejuang. Kedua determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain, suatu pihak harus percaya bahwa pihak lain juga memiliki aspirasi lain juga memiliki aspirasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan kedua pihak mencapai aspirasinya masing-masing. Ketiga, tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak, adanya zero sum thinking yang suatu cara berpikir keuntungannya saya adalah kerugianmu dan begitu sebaliknya. Hal ini membuat pihak yang berkonflik enggan memberikan andil keuntungan bagi pihak lain.⁶

Perbedaan persepsi tentang kepentingan akan memunculkan kesadaran dan perilaku yang berbeda oleh masing-masing pihak. Seperti yang dijelaskan dalam teori segitiga konflik, Sebuah segitiga menggambarkan adanya kontradiksi sebagai posisi diatas, lalu sikap dan perilaku berada posisi dibawah layaknya sebuah segitiga. Kontradiksi merupakan situasi konflik atau ketidakcocokan tujuan antara pihak yang berkonflik. Sedangkan sikap adalah sebuah persepsi dari pihak yang bertikai. Sikap memengaruhi sebuah rasa seseorang yaitu seperti ketakutan, rasa benci, kemarahan, yang termasuk dalam sebuah emotif (perasaan). Setelah sikap, perilaku mengarahkan pada tindakan fisik, yaitu implementasi dari sebuah sikap. Ancaman, paksaan, serangan itu semua adalah sebuah perilaku konflik. Pada tahap inilah aspirasi akan dikembangkan dan mengarah kepada konflik jika kepentingan yang dimiliki tidak sama dengan kepentingannya.

⁶ Ibid, hlm. 28-37

I.5.1.2 Pemilihan Strategi Sampai Eskalasi konflik

Ada beberapa kondisi yang mana dapat mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik untuk memilih strategi dasar dalam menyelesaikan konflik. Strategi itu meliputi contending, problem solving, yielding, inactive, dan withdraw.⁷ Kelima strategi ini dapat diterapkan dengan memilih salah satu diantaranya atau mengkombinasikan satu sama lainnya. Pemilihan akan strategi inilah yang kemudian menentukan determinasi pemilihan strategi yang merujuk pada kekuatan kepedulian hasil yang diterima sendiri dan hasil yang diterima pihak lain (*Dual Concern Model*) atau memberikan atribut kepada pemilihan berdasarkan kemungkinan keberhasilan yang harus dibayar dengan memilih suatu strategi (*Perceived Feasibility Perspective*).

Pada model kepedulian rangkap dua (*Dual Concern Model*), diidentifikasi ada dua macam kepedulian yang meliputi kepedulian terhadap hasil yang diterima sendiri dan juga kepedulian terhadap hasil yang diterima oleh pihak lain. Model ini membuat beberapa prediksi terkait dengan antensedan-antensedan pemilihan strategi.⁸ Pertama, kemungkinan bagi strategi problem solving akan diperbesar jika ada kepedulian yang kuat atas hasil yang diterima oleh diri sendiri maupun pihak lain. Kedua, kemungkinan strategi yielding akan besar kemungkinannya jika kepedulian yang kuat diperoleh dari hasil yang diterima oleh pihak lain. Ketiga, kemungkinan strategi contending akan besar jika kepedulian yang kuat diperoleh dari hasil

⁷ Ibid, hlm. 55-56

⁸ Ibid, hlm 62-63

yang diterimanya sendiri. keempat, kemungkinan strategi inaction akan besar jika kepedulian terhadap hasil yang diterima oleh kedua belah pihak lemah.

Berbeda halnya dengan model kepedulian rangkap dua, perspektif persepsi fisibilitas/keterlaksanaan (*Perceived Feasibility Perspective*), lebih pada perluasan strategi yang dianggap mampu untuk mencapai kepedulian. Jika model kepedulian rangkap dua menyebutkan tentang strategi yang lebih diprioritaskan untuk dipilih dalam berbagai kombinasi kepedulian atas hasil yang diterima oleh diri sendiri dan orang lain, perspektif persepsi fisibilitas/keterlaksanaan melengkapinya dengan pilihan yang memberikan kemungkinan strategi tersebut dapat dilaksanakan. Jika tidak demikian, maka strategi inaction yang dipilih akan kurang konsisten dengan kombinasi kepeduliaannya.

Pada suatu konflik yang terjadi, ada keadaan dimana ada pihak yang berupaya untuk menang. Dalam hal inilah mereka akan menggunakan taktik-taktik *contentious*.⁹ Adapun taktik yang dieksplor meliputi taktik mengambil hati (*ingrasi*), taktik meraih kemenangan (*gamesmanship*), dan taktik argumentatif persuasif (*janji, ancaman, dan komitmen*). Taktik-taktik ini berkecenderungan digunakan dari yang paling ringan sampai pada yang lebih berat. Penggunaan taktik-taktik *contentious* yang lebih berat tentunya akan disertai pula dengan eskalasi konflik.

Eskalasi konflik dapat diidentifikasi melalui penggunaan taktik-taktik *contentious* yang lebih berat, isu-isu berpoliferasi, lebih banyak sumber

⁹ *Ibid*, hlm 97

daya yang digunakan, isu-isu menjadi bersifat umum, kemunduran hubungan, ada tujuan agar pihak lain menderita, dan adanya partisipan lain yang ikut terlibat dalam konflik. Dari identifikasi itulah maka eskalasi akan meningkat ketika masing-masing pihak yang berkonflik memiliki tingkat persepsi atas kekuasaan lebih tinggi dan persepsi mengenai potensi integratif lebih rendah. Oleh sebab itulah aspirasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga tinggi. Selain itu, eskalasi memungkinkan dapat menurun jika ada norma atau lembaga yang membatasi konflik dan juga adanya keseimbangan kekuatan dapat berkontribusi pada stabilitas. Namun, ketika konflik cukup tajam, eskalasi akan tetap terjadi meskipun pada hubungan yang stabil.

Ada 5 transformasi yang biasa terjadi selama proses eskalasi yaitu sebagai berikut:

1. Ringan ke Berat, dari ingrasiasi, gamesmanship, argumentatif persuasif, dan janji berubah menjadi ancaman, komitmen yang tidak dapat diurungkan dan seterusnya.
2. Kecil ke besar, dari kecenderungan bahwa isu-isu yang ada mengalami proliferasi kemudian masing-masing pihak terserap dalam konflik yang ada sehingga bersedia mengerahkan sumberdaya seberapa pun untuk memenagkannya.
3. Spesifik ke umum, isu-isu yang bersifat spesifik berubah menjadi isu umum. Semula hanyalah kepedulian kecil dan konkret cenderung menjadi besar dan melibatkan semua posisi, disertai ketidaktoleransian umum terhadap pihak lain.

4. Berhasil lalu menang kemudian menyakiti orang lain, pada awal konflik semua pihak berusaha sebaik mungkin untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempedulikan hasil baik-buruk hasil yang diperoleh orang lain. Ketika berhasil maka menang atas orang lain. Akhirnya setelah eskalasi berlanjut ongkos yang harus dibayar kedua belah pihak semakin membengkak maka tujuan masing-masing pihak berubah lagi. Sekarang tujuannya adalah menyakiti orang lain. Dan apabila membutuhkan ongkos, maka pihak lainlah yang harus membayar lebih banyak untuk itu.
5. Sedikit ke banyak, konflik yang seringkali berangkat dari sedikit peserta berubah menjadi tindakan kolektif, ketika salah satu pihak gagal memenangkannya.¹⁰

Dalam hal menentukan mekanisme eskalasi suatu konflik, ada tiga model konflik yang diterapkan oleh partisipannya, yaitu meliputi agresor-defender, spiral-konflik, dan perubahan struktural.

Ketika konflik mengalami eskalasi, konflik akan terus cenderung tereskalasi. Teori mengenai eskalasi dapat diklasifikasikan dalam salah satu tiga model konflik. Pertama adalah model agresor-defender (penyerang-bertahan). Agresor sebagai penyerang akan melakukan taktik contentius yang ringan kepada defender sebagai pihak yang bertahan. Tetapi ketika agresor

¹⁰ Ibid, hlm. 143

tidak berhasil menggunakan contentius yang ringan akan berubah melakukan contentius yang lebih berat. Ini akan terus terjadi sampai pihak penyerang berhasil memenagkan tujuannya. Sedangkan defender hanya semata-mata bereaksi dari tindakan agresor.¹¹

Kedua adalah model Spiral-konflik bersifat balas membalas masing-masing pihak. masing-masing pihak saling menjatuhkan hukuman pada pihak lain atas tindakan yang tidak menyenangkan. Hal ini meyumbang pada eskalasi taktis, karena sekali menggunakan taktik berat digunakan, maka ia akan digunakan secara berkelanjutan menggunakan oleh kedua belah pihak.¹²

Dan yang terakhir adalah model perubahan-struktural. Konflik dan taktik-taktiknya kan menghasilkan sebuah residu residu memberikan perubahan pada pihak yang berkonflik ataupun pada masyarakat dimana mereka tinggal. Kemudian setelah itu residu ini mendorong contentius lanjutan, hal ini menyebabkan menurunnya usaha untuk menemukan resousi konflik. Perubahan itu meliputi perubahan psikologis, perubahan kelompok dan kolektif lainnya.¹³

Ketiga model inilah yang kemudian mampu menentukan keterlibatan dan tindakan dari pihak-pihak dalam konflik yang bereskalasi. Sehingga, arah yang dituju oleh suatu konflik dapat diprediksi. Ketiga model ini merupakan model pemikiran para partisipan konflik yang mana

¹¹ Ibid, hlm. 200

¹² Ibid, hlm. 202

¹³ Ibid, hlm. 206

mendeskripsikan bagaimana pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik bereskalasi memahami apa yang sedang terjadi dengan mereka. Implikasinya adalah pada tindakan yang akan membuat prediksi mengenai arah yang akan dituju oleh suatu konflik.

Tahap eskalasi konflik tidak pernah terlepas dari mekanisme yang mempertahankan atau menambah transformasi dalam konflik itu sendiri. mekanisme inilah yang akan mempengaruhi hubungan pihak-pihak yang berkonflik, sebagai tambahan atas cara-cara menangani isu yang menjadi sumber konflik. mekanisme-mekanisme yang demikian inilah yang juga menghasilkan berbagai residu yang menentang bahkan sampai konflik berakhir. Residu inilah yang kembali dapat mendorong konflik lebih jauh dan penggunaan taktik-taktik contentious yang lebih berat. Dengan demikian konflik tidak akan terus bereskalasi untuk selama-lamanya. Adakalanya pada titik tertentu, konflik akan dapat mereda.

Moscovici dan Zafalloni adanya polarisasi kelompok yang menyebabkan kuatnya dan ekstremnya persepsi individu. Ketika anggota kelompok menyampaikan argumentasinya, anggota lain akan mendengarkan dan akan bersependapat dengan argumentasinya, sehingga dia merasa pandangannya tervalidasi. Sehingga ketika konflik sosial melibatkan kelompok, akan memperkuat konflik itu sendiri.

Adanya perubahan norma tak terkendali yang mendukung pendekatan contentious terhadap kontroversi. Norma merupakan sebagai cara berpikir yang paling benar oleh semua anggota kelompok dan diajarkan

kepada anggota baru dan dipaksakan pada anggota lama. Subjek norma yang menyebabkan eskalasi konflik diantaranya adalah sikap negatif, ketidakpercayaan, dan keenganan berkomunikasi dengan pihak lain.¹⁴

Kemudian adanya solidaritas kelompok juga menambah sumbangan eskalasi konflik. Solidaritas akan memengaruhi perilaku kelompok. Lalu kelompok yang memiliki kepemimpinan militan, setiap kelompok tentunya pasti memiliki pemimpin. Para anggota kelompok perilakunya akan dipengaruhi oleh seorang pemimpinnya.

Kemudian yang terakhir adalah dalam eskalasi konflik timbulnya kelompok baru dan lebih militan. Ketika suatu pihak yang berkonflik merupakan sekumpulan orang yang tidak terorganisasi, maka kemudian lahir sebuah kelompok pejuang yang memiliki tugas mempertahankan kepentingannya. Hal menyebabkan eskalasi konflik akan semakin jauh. Hal ini dikarenakan kelompok pejuang memiliki tujuan untuk mengalahkan kepentingan pihak lawan dan juga kelompok pejuang memiliki atribut yang melekat padanya.

Konflik dengan cepat menyebar di tengah masyarakat, hal inilah yang disebut polarisasi masyarakat. Ketika dua kelompok terlibat dalam konflik yang berat, seringkali anggota kelompok yang ada di dalamnya tidak bisa bersikap netral. Mereka akan larut dan terbawa ke dalam lingkaran konflik yang terjadi. Mengapa anggota kelompok tidak bersifat netral, karena para partisipan kontroversi meminta dukungan pada anggota lain untuk bergabung

¹⁴ Ibid, hlm. 236

untuk ikut berpartisipasi atau jika tidak mau mereka akan menjadi lawan atau musuh. Ketika masyarakat mengalami polarisasi, maka konflik akan semakin jauh tereskalasi.¹⁵

I.5.1.3 Problem Solving

Sebagai upaya yang dilakukan untuk melokasikan suatu solusi bagi konflik yang terjadi, problem solving menghasilkan tiga macam hasil.¹⁶ Pertama, kompromi. Kompromi terkadang dapat menjadi baik ataupun buruk untuk kedua pihak. Namun, kompromi berkecenderungan memberikan hasil yang lebih kuat berada di tengah bagi kedua belah pihak. Kedua, kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang. Adapun kesepakatan ini dapat dilakukan dengan cara melempar koin yang mana pilihannya sesuai dengan permukaan koin maka itu yang dianggap sebagai pemenang, membandingkan kebutuhan, menyerahkan keputusan pada pihak ketiga, dan voting untuk mendapatkan suara mayoritas. Ketiga, solusi integratif. Cara ini dianggap sebagai cara yang terbaik karena bisa menghasilkan solusi yang sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Meskipun tidak sepenuhnya puas, solusi integratif merekonsiliasi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik secara parsial, sehingga membuat mereka merasa cukup puas tetapi tidak sebahagia seandainya mereka bisa mendapatkan seluruh keinginannya.

Ada lima macam rute yang mengarahkan solusi integratif.¹⁷

Pertama, memperbesar kue (*expanding the pie*). Formula ini bermanfaat bila pihak-pihak yang berkonflik menganggap bahwa proposal masing-masing

¹⁵ Ibid, hlm. 243

¹⁶ Ibid, Hlm. 315-320

¹⁷ Ibid, Hlm. 322-333

pihak sebenarnya dapat diterima tetapi sengaja ditolak karena mempertimbangkan nilai kesempatan. Kedua, kompensasi nonspesifik. Formula ini menjelaskan keterlibatan suatu pihak yang terlibat kontroversi mendapat nilai yang diinginkannya, sementara pihak lain mendapatkan pembayaran pengganti (*repayment*) dalam bentuk yang sama sekali tidak terait dengan isu kontroversinya. Kompensasi inilah yang disebut dengan nonspesifik bila kompensasi itu tidak terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak lain. Kompensasi biasanya datang dari pihak yang tuntutanannya terpenuhi, karena pihak tersebut membeli konsesi dari pihak lainnya. Namun hal ini juga dapat berasal dari pihak ketiga atau bahkan dari pihak yang diberi kompensasi. Ketiga, balas jasa (*Logrolling*). Pada formula ini, suatu pihak menyerahkan isu-isu yang tingkat prioritasnya rendah kepada diri sendiri dan isu-isu yang tingkat prioritasnya tinggi kepada pihak lain. Dengan cara inilah, masing-masing mendapatkan sebagian tuntutanannya yang dianggap paling penting bagi dirinya. Untuk mengembangkan solusi *logrolling*, sangat berguna bila dapat diperoleh informasi tentang prioritas masing-masing pihak atas berbagai isu sehingga konsesi dapat disesuaikan, tetapi tidak diperlukan informasi tentang sifat kepentingan yang melatarbelakangi prioritas tersebut. Keempat, pengurangan biaya (*cost cutting*). Pada formula ini, suatu pihak mendapatkan apa yang diinginkannya dengan mengurangi atau meniadakan biaya. Hasilnya adalah keuntungan yang sama sama tinggi, bukan karena suatu pihak mengubah posisinya, tetapi karena pihak lain berkurang bebannya. Pengurangan biaya ini adalah

kompensasi yang spesifik dimana pihak yang mengalah menerima sesuatu sebagai balasan yang tingkat kepuasannya sepadan dengan nilai yang dikorbankan. Kelima, menjembatani (*bridging*). Pada formula ini, tidak satu pihakpun yang mendapatkan tuntutan aslinya, tetapi sebuah opsi baru dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan keinginan-keinginan terpenting yang melatarbelakangi tuntutan tersebut. *Bridging* biasanya muncul dari reformulasi isu yang dibuat berdasarkan analisis terhadap kepentingan yang mendasari isu tersebut. Jadi, orang yang berusaha mengembangkan solusi melalui *bridging* biasanya harus memiliki informasi tentang berbagai kepentingan kedua belah pihak dan prioritas atas masing-masing kepentingan tersebut.

Untuk melakukan analisis kepentingan, orang harus melihat secara mendalam untuk mengetahui kepentingan apa saja yang mendasari kepentingan tadi, atau kepentingan yang mendasari kepentingan tadi. Oleh sebab itulah kepentingan seringkali diorganisasikan ke dalam suatu hierarki tertentu, dimana kepentingan yang lebih mendasar menjadi pondasi bagi kepentingan yang lebih superfisial. Dengan demikian, untuk menciptakan problem solving yang produktif ada beberapa langkah.¹⁸ Pertama, memastikan memang ada konflik kepentingan, kedua, melakukan analisis terhadap kepentingan sendiri dengan menetapkan aspirasi yang cukup tinggi secara masuk akal, dan bersiap untuk mempertahankannya, ketiga, mencari

¹⁸ Ibid, hlm. 340-344

cara untuk merekonsiliasi aspirasi kedua belah pihak, dan keempat, menurunkan aspirasi dan mencari beberapa aspirasi lagi.

I.6 Kerangka Konsep

I.6.1 Konflik

Dalam buku sosiologi konflik dan isu-isu kontemporer, konflik sebagai situasi pada saat para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang bersebrangan atau mengekspresikan naluri yang bersebrangan. Perilaku konflik terpilih menjadi koersif dan non koersif. Tindakan koersif merupakan bentuk tindakan social yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak ingin melakukannya. Sedangkan untuk non koersif adalah upaya mencari jalan keluar dari hubungan konflik.¹⁹

Mereka juga membagi konflik menjadi dua bagian. Pertama, fase solidaritas konflik, yaitu fase terciptanya konflik, menuju kompleksitas, melalui keterlibatan individu yang lain. Proses ini berlangsung melalui interaksi individu sebagai anggota secara intensif, ada rasa suka terhadap anggota yang lain, dan jika terdapat kesamaan kepercayaan, nilai-nilai dan norma. Kedua adalah fase sumber konflik, yaitu proses kelompok-kelompok berkonflik memanfaatkan instrument tertentu untuk menghadapi konflik. Mereka juga menyumbangkan pemikirannya pada dinamika konflik. Dinamika konflik disini adalah kondisi yang ditandai oleh eskalasi dan deskalasi konflik. Eskalasi konflik adalah meningkatnya berbagai

¹⁹ Novri Susan. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group hal 57.

tindakan koersif kedua belah pihak berkonflik sehingga aksi kekerasan timbale balik bisa muncul dalam situasi ini. Sedangkan deskalasi konflik akan muncul dengan ditandai dan disebabkan oleh penurunan aktivitas solidaritas konflik, sumber daya konflik, dan eskalasi strategis.²⁰

Konflik merupakan suatu masalah yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Perubahan sosial di dalam masyarakat selalu memicu terjadinya suatu heterogenitas terhadap kepentingan, nilai dan keyakinan yang menyebabkan adanya konflik ditengah-tengah masyarakat. Semakin banyaknya kepentingan, perbedaan nilai antar individu, kelompok akan semakin sulit menghambat konflik yang akan terjadi. Setiap individu selalu menginginkan mempertahankan kepentingannya sendiri diatas kepentingan individu yang lain, begitupula dengan kelompok yang akan selalu mementingkan kepentingannya sendiri diatas kepentingan kelompok lain. Bahkan untuk mempertahankan kepentingannya, mereka akan menghancurkan kepentingan yang berbeda dengannya.

Konflik selau melibatkan dua pihak yang saling merebutkan kepentingannya. Dalam perebutan kepentingan pasti akan pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan, ada yang sama- sama dirugikan antara kedua belah pihak dan juga ada sama-sama yang diuntungkan antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak diuntungkan dan satunya dirugikan, sehingga adanya kalah dan menang yang tidak bisa ditempuh dengan jalan

²⁰ Ibid, hal 59

kompromi menimbulkan suatu konflik kekerasan. Konflik kekerasan yang menyebabkan pertikaian antara kedua belah pihak. Sebenarnya konflik selalu menciptakan pihak yang merasakan situasi yang disebut zero-sum. Zero-sum adalah keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain. Dalam menyelesaikan konflik bagaimana caranya agar pihak melihat konflik sebagai non-zero-sum. Non-zero-sum yang dimaksud adalah dimana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya tidak memperoleh hasil.²¹

I.6.2 Pemekaran desa

Pemekaran desa pasti akan berhubungan dengan penggabungan atau pemecahan desa. Penggabungan atau pemecahan desa biasanya dilakukan desa-desa yang kecil, terdapat dua atau tiga buah bergabung dengan sedikitnya penduduk atau sempitnya wilayah, digabung menjadi kesatuan daerah hukum baru yang lebih besar. Dalam pemekaran, selain desa yang digabungkan, dukuh dan kampung juga dijadikan satu desa kesatuan.²²

Pamong praja, pemerintah daerah dan rakyat setempat yang bersangkutan berhak untuk mengambill inisiatif pemecahan atau penggabungan desa. Pada penggabungan desa-desa menyebabkan lemahnya ikatan desa. Desa-desa yang susunannya berdasarkan adanya tanah desa giliran makan penggabungan akan menyebabkan perubahan

²¹ Miall, Hugh dan Olivender Ramsbotham Tom Woodhouse. Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal 11

²² Kartohadikoesoemo, Soetardjo. Desa. Jakarta : PN Balai Pustaka hal 16

pada desa baru yang akan terjadi kesatuan-kesatuan social dengan mempunyai peraturan-peraturan sendiri waktu pendudukan itu masih menjadi desa sendiri.²³

Daerah-hukum baru akan berjalan sedikit demi sedikit menjadi kesatuan hukum yang agak kuat. Meskipun pemerintah-pemerintah dari desa-desa yang lama telah dihapuskan, akan tetapi hukum desa yang baru tidak bisa langsung diterapkan.

I.6.3 Desa adat (Pakraman)

Desa merupakan sebutan suatu wilayah yang hanya dipakai di daerah Jawa, Madura dan Bali, sedangkan daerah lainnya menggunakan sebuta dusun, dusun dati, gampong dan masih banyak lagi. Desa merupakan suatu kesatuan hukum, yaitu yang mana terdapat tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Geertz menjelaskan bahwa desa di Bali memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan desa-desa yang lainnya. Desa di Bali disebut negara desa, karena memiliki batas, mandiri, dan otonom sepenuhnya. Desa merupakan suatu unit organik yang mandiri, berbasis kosmologis, menutup diri dan tumbuh dari lahan budaya Bali asli. Berbeda dengan Negara yang bertindak dengan sewenang-wenang, kejam dan hirarkis kaku. Negara sebagai gangguan dari luar yang selalu mencoba

²³ Ibid, hal 100

masuk kedalam desa tetapi tidak pernah berhasil, kecuali dengan menindas.²⁴

Terdapat lingkup lokal yang terdapat bentuk-bentuk politis lokal yang memainkan peran dominan. Bentuk bentuk itu adalah penataan aspek publik dari kehidupan komunitas, pengaturan fasilitas-fasilitas irigasi dan pengorganisasian ritual rakyat. Desa memiliki lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, dusun (banjar, Organisasi pembagian air (subak), dan jamaah pura (pemaksan). Sehingga terbentuk suatu tantangan politis komposit yang terdiri , dari kelompok organisatori yang saling tindih dan terjalin di hampir semua pedesaan bali.²⁵

Dusun atau yang dibali disebut dengan banjar merupakan suatu unit pemukiman. Tetapi bukan berarti dusun ini bersifat teritorial, karena kadang- kadang anggota dusun itu berada pada diluar batas batas pemukiman dusun tersebut. Dusun memiliki kekuatan absolut diwilayah yuridiksinya, akan tetapi diluar itu, ia tidak berdaya. Dusun memiliki konstitusi-konstitusi atau aturan-aturan yang disebut awig-awig oleh orang bali. Dusun merupakan suatu komunitas sipil yang mengatur urusan religus dan juga acara ritualistik.

Dusun memiliki tanggung jawab akan fasilitas umum dan juga dusun sebagai penengah atau bertugas menyelesaikan konflik bila ada salah satu warganya ada yang sedang bertikai. Kemudian dusun mengatur pengalihan harta milik pribadi, tetapi ada salah satu hal yang tidak di

²⁴ Clifford Gertt. 2000. Negara Teater. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya. Hal 87

²⁵ Ibid, hal 91

campuri dusun adalah sawah, karena sudah ada lembaga tersendiri yang mengatur tentang sawah. Dusun juga memiliki kewenangan untuk mengurus urusan personal yaitu pernikahan dan perceraian. Dusun memiliki kewenangan penuh atas semua kehidupan anggotanya dari menyangkut orang banyak sampai urusan personal. Dusun bisa menerapkan pajak dan denda, bisa menanam modal dalam usaha-usaha komersial.

Kembali ke lembaga yaitu yang disebut pemaksaan, anggota dari pemaksaan adalah berasal dari sepuluh dusun, bisa kurang atau lebih. biasanya dusun-dusun ini saling berdekatan lokasinya dengan dusun lain kemudian membentuk yang dinamakan pemaksaan dan aspek ruangnya disebut desa adat. Desa adat pada pokoknya adalah bukan sistem sosial sama sekali, melainkan semacam ruang suci, ruang suci terbentuk didasarkan pada kepercayaan bali bahwa segala sesuatu yang ada diatas tanah merupakan milik dewa-dewa. Pemaksaan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum-hukum moral seperti adat yang telah ditetapkan oleh dewa.²⁶

Kewajiban orang bali adalah memuja dewa-dewanya, sehingga di dalam desa adat terdapat kahyangan tiga atau tiga pura agung. Kahyangan tiga menurut nama-namanya, adalah Pura Asal (puseh), yaitu sebagai untuk memperingati mulai dimukimkan nya daerah itu oleh manusia, kemudian pura dalem, ditujukan untuk menenangkan orang mati yang

²⁶ Ibid, hal 100

belum dikremasi, jadi sifatnya berbahaya dan yang terakhir adalah pura balai agung, pura ini ditujukan untuk menjamin kesuburan wilayahnya seperti tanah dan bahkan wanitanya. Satu desa adat memiliki tiga pura khayangan dan satu pura biasanya terdapat enam dusun. Sehingga pemaksaan adalah jamaah yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara tiga pura tersebut.²⁷

I.7 Metode Penelitian

I.7.1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini pada konflik antar warga desa yang ingin memisahkan diri dari desa induk menjadi desa pakraman sendiri. Proses pemekaran desa pakraman selalu diiringi oleh pro kontra antar warga desa adat terhadap pemekaran desa pakrman, sehingga terjadi konflik horizontal yang menimbulkan kerugian terhadap masing-masing pihak yang berkonflik.

I.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif akan menguraikan suatu gejala sosial. Dengan menguraikan suatu gejala sosial penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan, meringkas kondisi, berbagai situasi dan variabel.

Riset kualitatif menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Riset kualitatif

²⁷ Ibid, hal 101

cenderung pada usaha untuk mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah peristiwa yang dianggap menarik dan mencerahkan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam bukan meluas.²⁸

I.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah yang dimaksud dengan narasumber atau informan. Narasumber atau informannya adalah dari pihak Desa Pakraman Manuksesa adalah Pemangku Agama yaitu I Nyoman Pasek, Bandesa Adat, Made Susila dan Warganya yang berinisial K. Sedangkan dari Desa Pakraman Bebetin adalah salah satu Pemuka Agama yang berinisial IB dan warganya yang berinisial GA.

I.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu Desa Bebetin dan Desa Manuksesa. Desa Bebetin merupakan desa induk, sedangkan desa manuksesa adalah desa yang memekarkan diri dari desa induknya.

Lokasi utama yang menjadi objek utama adalah Desa Pakraman Manuksesa, sedangkan Desa Pakraman Bebetin adalah sebagai objek pelengkap saja. Sehingga pada saat penelitian, peneliti akan lebih fokus pada informasi yang disampaikan oleh Desa Parkaman Manuksesa.

²⁸ Lisa Harrison. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007. Hlm 86.

I.7.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan. Peneliti berperan mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan inti sebagaimana tertera dalam daftar pertanyaan sehingga informan dapat memahami pertanyaan tersebut. Peneliti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan diluar daftar pertanyaan yang sifatnya berhubungan dan merupakan pengembangan dari pertanyaan inti di daftar pertanyaan.

Wawancara akan dilakukan secara mendalam kepada kepala desa adat, tokoh masyarakat desa yang terlibat di dalam pemekaran desa pakraman, kemudian masyarakat desa.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada narasumber lebih fokus pada pihak Desa Pakraman Manuksesa sebagai pihak yang menuntut adanya pemekaran. Desa Pakraman Bebetin sebagai pihak kedua yang statusnya sebagai Desa Induk Pakraman.

Wawancara yang dilakukan ada sebagian yang menggunakan alat perekam dan juga ada yang tidak menggunakan alat perekam. Melihat kondisi masyarakat desa adat yang sedikit terganggu dalam wawancara yang menggunakan alat perekam. Hal itu bertujuan nantinya agar saat wawancara peneliti dapat mengambil substansinya dari informasinya yang disampaikan oleh narasumber.

I.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan cara pengumpulan data yang didapatkan dari narasumber kemudian dianalisa secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka teoritik guna memberikan gambaran yang tepat pada fenomena yang diteliti. Ada beberapa cara dalam proses analisis data kualitatif, yaitu : pertama, dengan pemetaan. Pemetaan dibuat untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi yang muncul dari data yang tersedia. Kedua, dengan menghubungkan hasil temuan dengan referensi dan teori yang berlaku dan mencari hubungan diantara sifat-sifat kategori.

Kemudian hasil wawancara disusun untuk mengetahui kategori tertentu, atau pokok permasalahan tertentu yang menunjuk pada permasalahan penelitian. Setelah itu akan dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan.

I.8 Simpulan teoritik

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka berikut adalah simpulan teoritiknya. Apa persepsi yang menjadi persoalan konflik masing-masing pihak desa adat akan di jawab menurut teori konflik yang digagas oleh Dean G. Pruitt, sebelum perbedaan kepentingan suatu pihak bertentangan dengan pihak yang lain, maka kepentingan tersebut harus diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi yang mana di dalamnya terdapat tujuan dan standar. Aspirasi inilah yang kemudian harus dianggap tidak sesuai dengan aspirasi pihak lain. Ketidaksesuaian inilah yang

menghasilkan persepsi dari masing-masing pihak bahwa pemuasan atas aspirasi suatu pihak menghalangi aspirasi pihak yang lainnya. Dengan demikian, suatu konflik selalu dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi mengenai kepentingan.

Kemudian yang menyebabkan ketidaksesuaian aspirasi yaitu pertama tingginya tingkat aspirasi suatu pihak, kedua persepsi suatu pihak terhadap pihak lain dan tidak ditemukannya alternatif diantara kedua belah pihak.

Pertama, determinan tingkat aspirasi Ada dua determinasi tingkat aspirasi, pertama, aspirasi akan bangkit dan menghasilkan konflik karena masing-masing pihak mempunyai alasan untuk percaya bahwa mereka menganggap mampu untuk mendapatkan sumberdaya yang bernilai bagi diri mereka sendiri atau bersifat realistis. Kedua, mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki sumberdaya yang bernilai tersebut atau bersifat idealis. Peningkatan aspirasi dengan alasan realistis seperti di atas, muncul ketika orang berhadapan dengan pihak lain yang sumberdayanya dianggap berharga dari apa yang telah dimilikinya. Oleh sebab itulah ketika aspirasi antara kedua pihak tidak menurun secara bersamaan, maka konflik akan bersifat semakin eksploitatif. dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam cara diantaranya prestasi masa lalu, kemudian persepsi mengenai kekuasaan, aturan dan norma, perbandingan dengan orang lain, dan terakhir terbentuknya kelompok pejuang. Kedua determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain, suatu pihak harus percaya bahwa pihak lain

juga memiliki aspirasi lain juga memiliki aspirasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan kedua beah pihak mecapai aspirasinya masing-masing. Ketiga, tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak, adanaya zero sum thingking yang suatu cara berpikir keuntungannya saya adalah kerugianmu dan begitu sebaliknya. Hal ini membuat pihak yang berkonflik enggan memberikan andil keuntungan bagi pihak lain.

Kemudian bagaimana tahap eskalasi konflik antara kedua belah pihak desa adat, Di dalam teori konflik, ada lima pilihan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Strategi itu meliputi contending, problem solving, yielding, inactive, dan withdraw. Kelima strategi ini dapat diterapkan dengan memilih salah satu diantaranya atau mengkombinasikan satu sama lainnya. Pemilihan akan strategi inilah yang kemudian menentukan determinasi pemilihan stategi yang merujuk pada kekuatan kepedulian hasil yang diterima sendiri dan hasil yang diterima pihak lain. Ketika kedua kepedulian tersebut kuat, maka startegi yang akan dipilih adalah problem solving. Ketika kepedulian diri sendiri yang kuat, maka strategi yang akan dipilih adalah contending. Ketika kepedulian terhadap hasil yang diterima oleh yang kuat maka strategi yang akan dipilih adalah yielding dan apabila kedua kepedulian itu lemah, maka strategi yang akan dipilih adalah inaction.

Konflik mencapai tahap eskalasi ketika masing-masing pihak yang berkonflik memiliki tingkat persepsi atas kekuasaan lebih tinggi dan

persepsi mengenai potensi integratif lebih rendah. Oleh sebab itulah aspirasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga tinggi.

Ada 5 transformasi yang biasa terjadi selama proses eskalasi yaitu sebagai berikut:

1. Ringan ke Berat, dari ingrasiasi, gamesmanship, argumentatif persuasif, dan janji berubah menjadi ancaman, komitmen yang tidak dapat diurungkan dan seterusnya.
2. Kecil ke besar, dari kecenderungan bahwa isu-isu yang ada mengalami proliferasi kemudian masing-masing pihak terserap dalam konflik yang ada sehingga bersedia mengerahkan sumberdaya seberapa pun untuk memenagkannya.
3. Spesifik ke umum, isu-isu yang bersifat spesifik berubah menjadi isu umum. Semula hanyalah kepedulian kecil dan konkret cenderung menjadi besar dan melibatkan semua posisi, disertai ketidaktoleransian umum terhadap pihak lain.
4. Berhasil lalu menang kemudian menyakiti orang lain, pada awal konflik semua pihak berusaha sebaik mungkin untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempedulikan hasil baik-buruk hasil yang diperoleh orang lain. Ketika berhasil maka menang atas orang lain. Akhirnya setelah eskalasi berlanjut ongkos yang harus dibayar kedua belah pihak ssemakin membengkak maka tujuan masing-masing pihak berubah

lagi. Sekarang tujuannya adalah menyakiti orang lain. Dan apabila membutuhkan ongkos, maka pihak lainlah yang harus membayar lebih banyak untuk itu.

5. Sedikit ke banyak, konflik yang seringkali berangkat dari sedikit peserta berubah menjadi tindakan kolektif, ketika salah satu pihak gagal memenangkannya.

Selanjutnya untuk menentukan mekanisme eskalasi suatu konflik, ada tiga model konflik yang diterapkan oleh partisipannya, yaitu meliputi agresor-defender, spiral-konflik, dan perubahan struktural. Ketiga model inilah yang kemudian mampu menentukan keterlibatan dan tindakan dari pihak-pihak dalam konflik yang bereskalasi. Sehingga, arah yang dituju oleh suatu konflik dapat diprediksi.

Terakhir bagaimana resolusi konflik antara kedua belah pihak desa adat, sebagai upaya yang dilakukan untuk melokasikan suatu solusi bagi konflik yang terjadi, problem solving menghasilkan tiga macam hasil. Pertama, kompromi. Kompromi terkadang dapat menjadi baik ataupun buruk untuk kedua pihak. Namun, kompromi berkecenderungan memberikan hasil yang lebih kuat berada di tengah bagi kedua belah pihak. Kedua, kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang. Adapun kesepakatan ini dapat dilakukan dengan cara melempar koin yangmana pilihannya sesuai dengan permukaan koin maka itu yang dianggap sebagai pemenang, membandingkan kebutuhan, menyerahkan keputusan pada pihak ketiga, dan voting untuk mendapatkan suara

mayoritas. Ketiga, solusi integratif. Cara ini dianggap sebagai cara yang terbaik karena bisa menghasilkan solusi yang sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Meskipun tidak sepenuhnya puas, solusi integratif merekonsiliasi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik secara parsial, sehingga membuat mereka merasa cukup puas tetapi tidak sebahagia seandainya mereka bisa mendapatkan seluruh keinginannya.